

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Rubaie, 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa Univerity Press, Surabaya.
- Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Bernhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta : Margaretha Pustaka.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*. Jakarta ; Djambatan.
- Fuadi, Munir, 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok; Rajawali Pers.
- Ibrahim, Jhonny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang; Bayumedia.
- Muliawan, J.W. (2015). *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*. Malang : Buku Litera
- Perangin, Parangin, 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta ; Rajawali Pers.
- Salindeho, john, 1987. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Santosa, Urip, 1998, *Aspek Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*.
- Setiawan, Yudhi, 2009. *Instrumen Hukum Campuran (Gemeen schapelijk recht) dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta ; Raja Grafindo Persada,
- Setiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Sihombing, 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta; PT. Toko Gunung Agung.
- Sitorus, Oloan, 2004. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia Yogyakarta,

Sutedi, Adrian, 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Demi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

C. Jurnal, Skripsi, dan lain-lain

Arrazzi, F. (15 Oktober 2020). Jika Jalur Tol Tak Dipindahkan di 4 Nagari di Limapuluh Kota, Ada Sumber Pencarian & Kaum Bakal Lenyap. *Padangkita.com*, 08 Maret 2021. <https://padangkita.com/jika-jalur-tol-tak-dipindahkan-di-4-nagari-di-limapuluh-kota-ada-sumber-pencarian-dan-kaum-bakal-lenyap/>

Bahrin, B.G. Sugihen., Basita, G., Susanto, Djoko, Asngari, Pang, S. (2016). LuasLahan Dan Kebutuhan Dasar (Khusus Rumahtangga Petani Miskin di Daerah Tinggi Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Penyuluhan* 4, pp. 116-12

Cakapalah.com. *Proyek Tol Pekanbaru-Padang seksi Pangkalan-*

Payakumbuh Sicincin Ditangguhkan. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

Citraningtyas Wahyu Adhie, 2010. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri*. Surakarta.

Detiksumut. *Wagub Sumbar Puji Kabupaten Limapuluh Kota Dukung Proyek Tol Padang-Pekanbaru*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2022

Djanggih, H., & Salle, S. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 12(2), 165-172.

Fokuskriminal.com. *Hearing Dengan Masyarakat Yang Akan Terdampak Pembangunan Jalan Tol,, Bupati Limapuluh Kota,, Alfa*. Diakses pada tanggal 08 Juni 2022

Hendra, N. (20 November 2020). Proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Alami Kendala di Ruas LimapuluhKota. *Bisnis.com*, 5 Januari 2022. <https://sumatra.bisnis.com/read/20201110/534/1316065/proyek-jalan-tol-padang-pekanbaru-alami-kendala-di-ruas-limapuluh-kota/>

Kppip.go.id. *Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Dimulai*. Diakses pada tanggal 08 Maret 2021. <https://kppi.go.id/berita/pembangunan-tol-padang-pekanbaru-dimulai/>

Munif, A. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Rayat Atas Tanah Dalam Pembangunan (Kajian Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006). *Jurnal Yustisia* 11, pp. 1-25

Nur Safidah, 2016. *Pengadaan Tanah Untuk Pemabangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu*. Lampung

Priska Yulita Raya, 2014. *Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*. Jogjakarta